



**REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JANUARI 2023



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Penentuan Isu isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Sasaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Lampiran I POHON KINERJA

Lampiran II Cascading

Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan sasaran, strategi serta kebijakan. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat selama 4 (Empat) tahun mendatang.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Liwa, 25 JANUARI 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DAMAN NASIR.,MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680701 198901 1002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah dokumen perencanaan Manajerial Strategik untuk periode 4 (Empat) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJMD , serta

Tata Cara Perubahan RPJP Daerah RPJMD;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun.

1.3.1. Maksud

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 - 2026 untuk menciptakan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat;
2. Memberikan pedoman dan Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Penentuan Isu isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Sasaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Lampiran I POHON KINERJA

Lampiran II Cascading

Lampiran III Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasubbag Umum dan Perencanaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Penanaman Modal
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas ;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas ;

Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Sub Bagian Umum & Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal,

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal,

Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah.
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi /kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal ,antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
- f. Penyusunan bahan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- g. Pelaksanaan pemantaun realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan pusat ,perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

1. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi [secara elektronik] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok JF Substansi pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 22 orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) = 11 orang

Tabel 2.1

Berdasarkan kepangkatan/golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV	5	23 %
2	III	14	64 %
3	II	3	13 %

Tabel 2.2

Berdasarkan tingkat kependidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S.3	0	0
2	S.2	5	23 %
3	S.1	13	59 %
4	D.III	2	9 %
5	SMA	2	9 %
6	SD	0	0

Tabel 2.3

Berdasarkan Pendidikan Penjejjangan/Diklat

NO	Pendidikan/Diklat	Jumlah	Persen
1	SPAMEN/PIM II	1	5 %
2	SPAMA / PIM III	1	5 %
3	ADUM / PIM IV	8	36 %
4	BELUM PERNAH	12	54 %

2.3

S P P P

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kendaraan Roda 4	2	
2	Kendaraan Roda 2	9	
3	Komputer	9	
4	Laptop	3	
5	Proyektor	1	
6	Mesin Tik	2	1 Rusak
7	Meja Kerja	25	
8	Kursi	23	
9	Filing Kabinet	5	
10	Lemari Kayu	2	
11	Telepon	1	
12	Papan Pengumuman	1	
13	Sofa	1	
14	Kursi tunggu	1	
15	Meja fron office	1	
16	Meja Piket	1	
17	Absen Sidik Jari	1	
18	Brankas	1	
19	TV dan Parabola	1	
20	Gedung /Kantor	1 Unit	

2.4 Kinerja Pelayanan Pelayan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 20 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Investasi PMDN / PMA tahun 2018 s.d 2021
Kabupaten Lampung Barat



Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 s.d 2022
Kabupaten Lampung Barat

N O	SASARA N OPD	INDIKATOR	2018		2019		2020		2021		2022	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 3.325.564.458	Rp. 25.947.491.049,-	Rp. 3.491.842.681,-	Rp. 142.671.845.207,-	Rp. 3.666.434.815,-	Rp. 113.483.975.551,-	Rp. 3.849.756.556,-	Rp. 112.921.542.189,-	Rp. 4,042 M	Rp. 261.030.787. 440,-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,80%	80,07%	80,84%	79,51%	80,89%	83,48%	80,92%	83,23%	0	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, maka peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung sebagai berikut

Peluang :

- ▶ Tersedianya media komunikasi yang didukung teknologi canggih;
- ▶ Peluang investasi yang begitu besar dengan tersedianya infrastruktur yang memadai
- ▶ Masih luasnya lahan investasi
- ▶ Tersedianya sumber daya alam
- ▶ Peningkatan citra birokrasi yang berorientasi pada kepuasan investor.

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi pada lima tahun kedepan adalah :

- ▶ Penyelenggaraan *Online Single Submission* (OSS), perizinan berusaha berbasis risiko belum sepenuhnya berjalan maksimal
- ▶ Pemohon layanan belum seluruhnya memahami dan memanfaatkan teknologi IT;
- ▶ persaingan global semakin kencang;
- ▶ kurang terampilnya tenaga lokal daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- permasalahan sebagaimana table T-B.35 berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Regulasi Perizinan yang selalu dinamis/berubah-ubah di tingkat nasional	Belum optimalnya pelayanan perizinan secara elektronik	Sering terjadinya gangguan pada sistem aplikasi perizinan Terbatasnya kualitas serta kuantitas Sumber Daya Aparatur
			Fasilitas pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan public : 1. Belum tersedianya dukungan kendaraan operasional guna kunjungan lapangan dalam rangka permohonan izin dan pengawasan perizinan yang melibatkan Tim Teknis Perizinan; 2. Ruang layanan belum sesuai dengan standar

			Permendagri 138 Tahun 2017
		Belum semua pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi informasi terkait aplikasi perizinan berusaha	SDM masyarakat Lampung Barat yang masih terbatas
			Belum meratanya akses internet di wilayah kabupaten Lampung Barat
2	Belum meratanya realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan di Lampung Barat	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Lampung Barat	Intensitas promosi peluang investasi masih rendah
			Belum adanya kebijakan terkait iklim pengembangan penanaman modal
			Belum adanya kebijakan yang mengatur promosi penanaman modal

Berdasarkan table di atas permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik
dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan public
Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;

- b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
- c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
- d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
- e. Pelaksanaan Perizinan mobile

3.3. Penentu Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka disimpulkan isu – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Regulasi Perizinan yang selalu dinamis di tingkat nasional
2. Akses dan Potensi Daerah yang belum terkelola dengan baik
3. Masih Perlunya Kemitraan dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM

Faktor kekuatan/peluang, kelemahan / tantangan yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul dikemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar menjadi profesional ;
3. Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan ;

2. Dukungan sumber dana yang memadai ;
3. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perizinan yang konsisten.
4. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan perizinan dengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima.
5. Adanya inovasi-inovasi dalam menarik investor baik melalui promosi, penyelenggaraan klinik investasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (Empat) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal;

Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan;

Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut

SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;		Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 Milyar	Rp. 104,64 Milyar	Rp. 109,87 Milyar
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 Milyar	Rp. 104,64 Milyar	Rp. 109,87 Milyar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	82	85	88,5

Tujuan tersebut menggambarkan keadaan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dalam jangka waktu empat tahun ke depan maka sasaran strategis merupakan ukuran-ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan itu telah dicapai. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan pemanfaatan teknologi

Kualitas pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Secara konvensional, kualitas diartikan sebagai gambaran karakteristik langsung dari suatu produk seperti performansi (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam penggunaan (*ease of use*), estetika (*esthetics*). Sedangkan dalam pengertian secara strategik, kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Maka kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik untuk pelayanan perizinan maupun non perizinan dengan melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan yang dipusatkan di satu tempat. Penyederhanaan ini dengan tujuan untuk makin meningkatkan kualitas pelayanan publik

dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Ini yang melandasi pembentukan PTSP mencerminkan pula sikap, tingkat kesadaran dan komitmen lembaga legislatif dan eksekutif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan pelayanan yang memuaskan atau tidak kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan publik diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (**IKM**) dengan ruang lingkup yang diukur adalah

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan
3. Prosedur
4. Waktu Penyelesaian
5. Biaya / Tarif
6. Prociuk Spesifikasi Jenis Pelayanan
7. Kompetensi Pelaksana / Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan prasarana

Dalam rentang periode 2023 – 2026, target IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan Kabupaten Lampung Barat yang hendak dicapai adalah kenaikan 3 point untuk setiap tahunnya. Yang akan dilakukan dalam pencapaian dan mempertahankan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target tersebut adalah dengan membenahi ruang pelayanan, sistem layanan, waktu penyelesaian permohonan, peningkatan kompetensi SDM.

2. Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi

Iklim usaha merupakan kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, agar masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluar-luasnya terutama bagi usaha kecil sehingga berkembang menjadi tangguh dan mandiri. (Sumber Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil).

Iklim investasi adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa datang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002).

Beberapa pilihan langkah kebijakan sebaiknya difokuskan pada beberapa hal yang menjadi tinjauan penting, dengan tidak mengenyampingkan faktor lain. Beberapa hal tersebut diantaranya :

1. Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan Transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah.

Iklim investasi merupakan salah satu kajian penting dalam penunjang penguatan ekonomi domestik. efek ganda yang berasal dari investasi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi yang baik akan mendorong aktivitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya beli masyarakat yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kestinambungan ini dibutuhkan alur yang searah untuk dapat mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat.

Iklim investasi juga tidak lepas dari pengaruh keadaan ekonomi domestik dan global. Dinamika yang terjadi di dalam dan luar negeri berpengaruh terhadap naik atau turunnya tingkat ingkat investasi di Indonesia. Namun dengan perencanaan dan pelaksanaan terhadap perbaikan iklim investasi akan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Perbaikan-perbaikan bagi pelaksanaan investasi harus dapat direalisasikan, sehingga bagi semua pihak dapat merasakan dampak baik dari investasi yang tumbuh di Indonesia.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah /Perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi & Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah;	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi, Menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan pembangunan	Penyusunan Kebijakan Terkait Iklim Pengembangan Penanaman Modal serta penyusunan kebijakan yang mengatur promosi Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerja sama ; Pelaksanaan Sosialisasi serta pengawasan pengendalian penanaman modal

Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Penanaman Modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kinerja & Efektivitas Pelayanan Publik Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan	Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada organisasi sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang dan modal termasuk peralatan teknologi, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang ataupun jasa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung dalam periode 2023 – 2026 akan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana lampiran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah.

Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah tahunan. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun periode 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Rupiah	$\frac{\text{Nilai Investasi Tahun N} \times 5\%}{\text{Nilai Investasi N-1}}$	Rp. 95 Milyar	Rp. 99,75 Milyar	Rp. 104,64 Milyar	Rp. 109,87 Milyar
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Point/Predikat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	79	82	85	88,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Dalam pelaksanaannya dokumen ini berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 4 tahun mendatang;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026;
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan serta sebagai acuan penyusunan rencana strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lampung Barat.

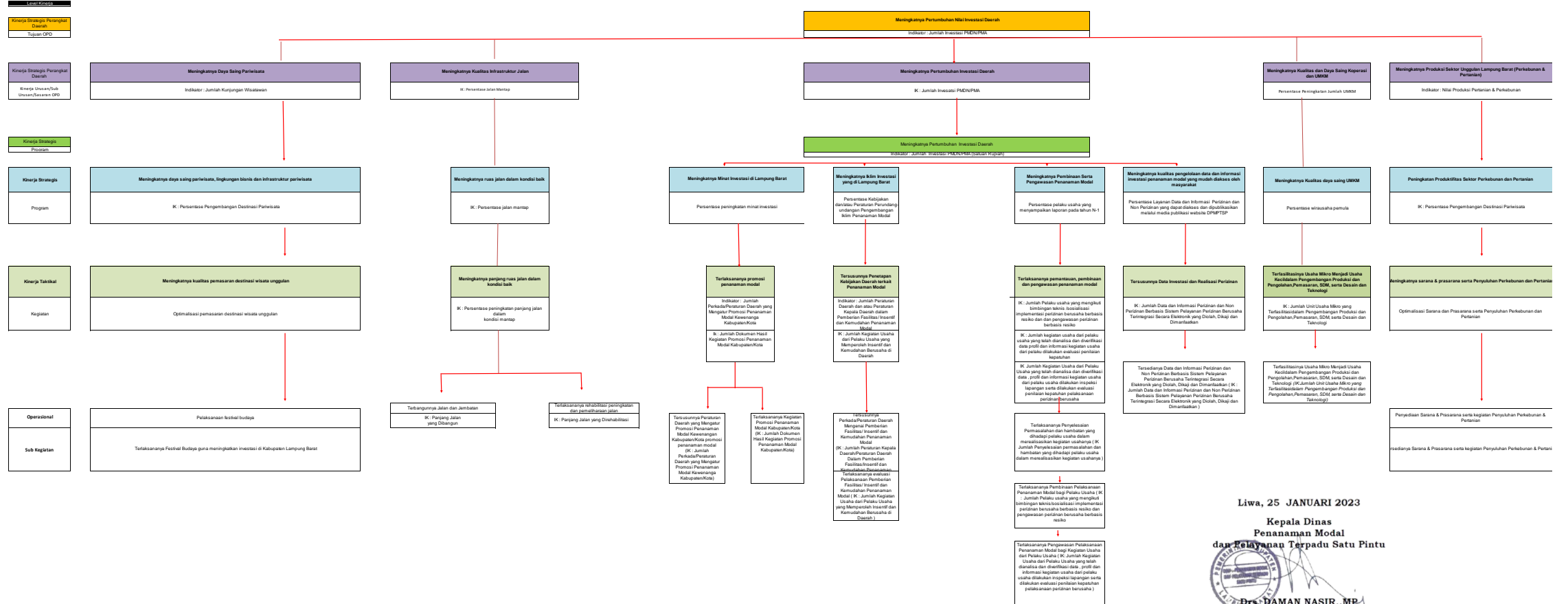
Liwa, 25 JANUARI 2023

**Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



**Drs. DAMAN NASIR.,MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680701 198901 1 002**

LOGICAL FRAMEWORK / POKOK KNERIA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN RELAYAN TERPADU SATU PINTU
TAKSIK 2023-2028



Liwa, 25 JANUARI 2023
Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Relayanan Terpadu Satu Pintu
Drs. DAMAN NASIR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680701 198901 1 002

Level Kinerja
 Kinerja Strategis, Perangkat Daerah
 Tujuan OPD

Kinerja Strategis, Perangkat Daerah
 Kinerja Usaha/Sub Usaha/Sasaran OPD

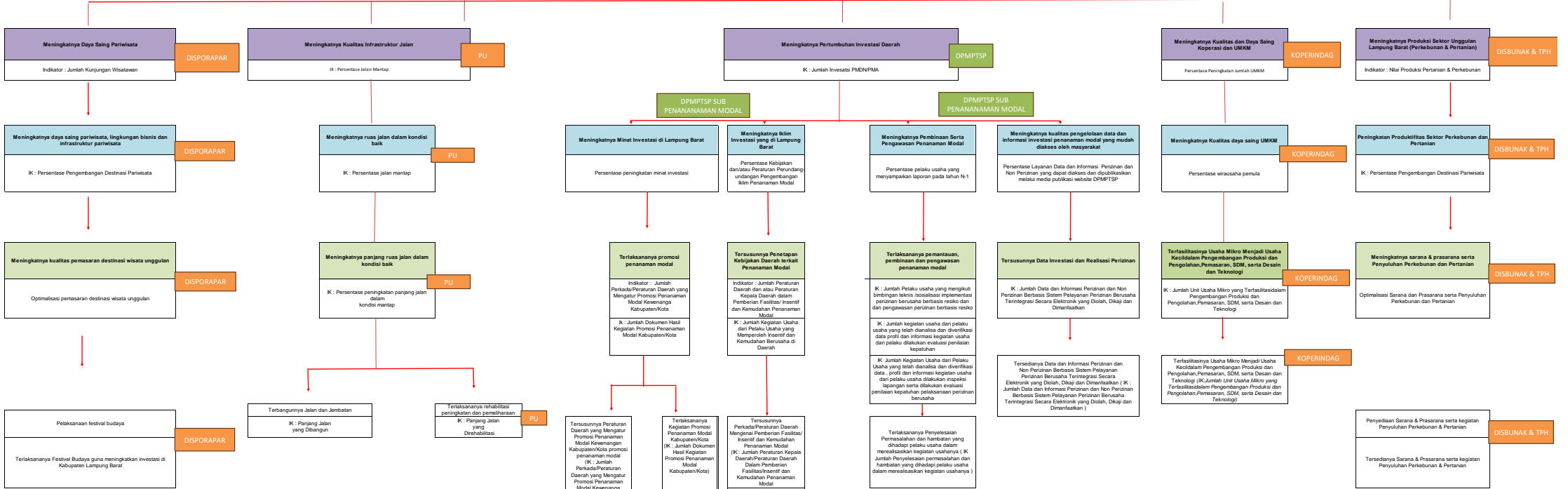
Kinerja Strategis
 Program

Kinerja Taktikal
 Kegiatan

Operasional
 Sub Kegiatan

LOGICAL FRAME WORK / POHON KINERJA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 TAHUN 2023-2026

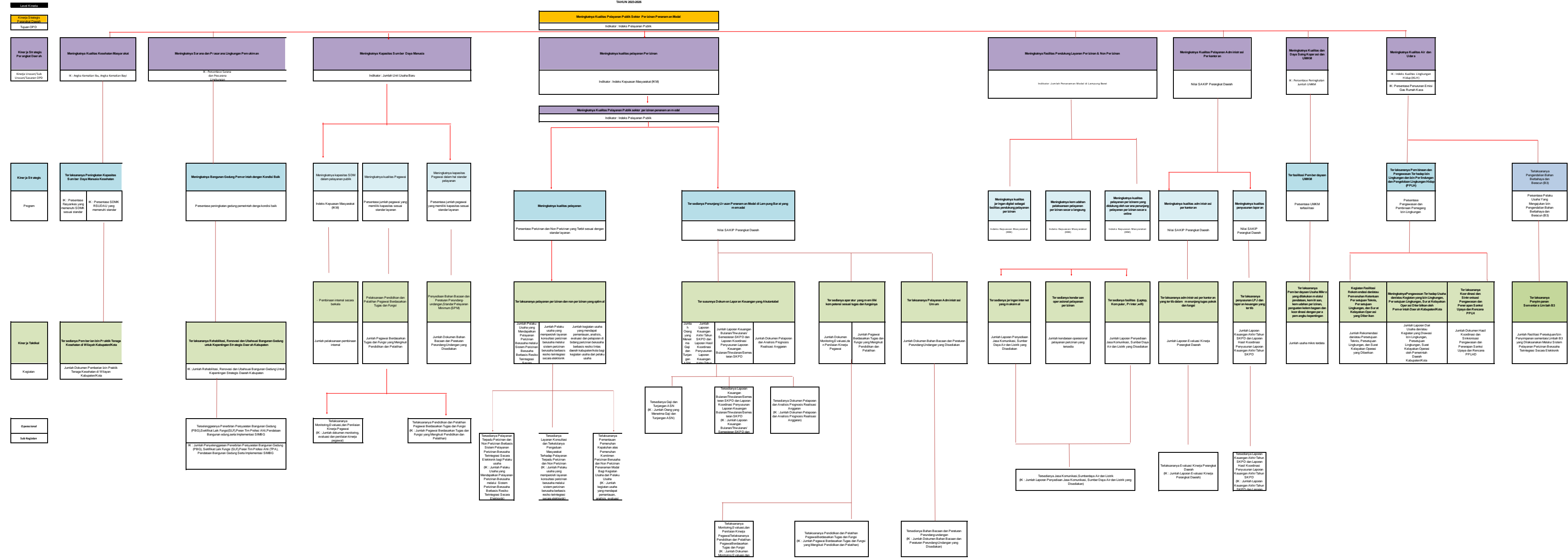
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah
 Indikator : Jumlah Investasi PMDNPMA



Liwa, 25 JANUARI 2023
 Kepala Dinas
 Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 Drs. DAMAN NASIR., MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680701 198901 1 002

LOCAL FRAME WORK / FOKUS KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2023-2025



Liwa, 25 JANUARI 2023
Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DR. DAMAN NASIR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680701 198901 1 002

NAMA KELOMPOK	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	TANGGAL				KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	TANGGAL			
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
KEMAHKUMHARAN PENGUSAHA	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
KEMAHKUMHARAN	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
KEMAHKUMHARAN	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
KEMAHKUMHARAN	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
KEMAHKUMHARAN	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
KEMAHKUMHARAN	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024	KEMAHKUMHARAN	MENDIRI/KELOMPOK KELOMPOK	KATEGORI	2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024
				2021	2022	2023	2024				2021	2022	2023	2024

Liwa, 25 JANUARI 2023
 Kepala Dinas
 Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. DAMAN NASIR, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680701 198901 1 002

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	PAGU DPA 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sektor perizinan penanaman modal	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,73	78,73	2.934.694.900	78,80	3.977.130.530.000	79,00	4.141.096.807.000	79,50	7.128.385.584.000	80	7.328.683.513.000	79,25	22.575.266.434.000		
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88 Dokumen	22 Dokumen	23.532.400	11 Dokumen	28.238.880	11 Dokumen	33.886.656	11 Dokumen	40.663.987	8 Dokumen	48.796.785	38 Dokumen	151.586.308.000	Baik Bukti	
				Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun				5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		20 Dokumen			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		48 Laporan			
		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	4 Dokumen	3.268.000	11 Dokumen	3.921.600	11 Dokumen	4.705.920	11 Dokumen	5.647.104	8 Dokumen	6.776.525	38 Dokumen	21.051.149.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1.848.100	1 Dokumen	2.217.720	1 Dokumen	2.661.264	1 Dokumen	3.193.517	1 Dokumen	3.832.220	4 Dokumen	11.904.721.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	-	1.811.000	1 Dokumen	2.173.200	1 Dokumen	2.607.840	1 Dokumen	3.129.408	1 Dokumen	3.755.289	4 Dokumen	11.665.737.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1.627.300	1 Dokumen	1.952.760	1 Dokumen	2.343.312	1 Dokumen	2.811.874	1 Dokumen	3.374.369	4 Dokumen	10.482.415.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	-	1.581.000	1 Dokumen	1.897.200	1 Dokumen	2.276.640	1 Dokumen	2.731.968	1 Dokumen	3.276.362	4 Dokumen	10.184.170.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Dokumen	4 Dokumen	1.969.600	1 Laporan	2.363.520	1 Laporan	2.836.224	1 Laporan	3.403.469	1 Laporan	4.084.163	4 Laporan	12.687.376.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	11.427.400	12 Laporan	13.712.880	12 Laporan	16.455.456	12 Laporan	19.746.547	12 Laporan	23.695.957	48 Laporan	73.610.740.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	4 Dokumen	2.511.311.000	28 Orang	2.888.007.650	28 orang	3.321.208.797	28 orang	3.819.390.115	29 orang	4.392.296.631	29 orang	14.420.905.193.000	Baik Bukti	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan		17 Laporan		17 Laporan		17 Laporan		68 Laporan			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	2.505.810.500	28 Orang	2.881.682.075	28 Orang	3.313.934.388	28 Orang	3.811.024.543	29 Orang	4.382.678.224	29 Orang	14.389.319.228.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Laporan	2.875.000	1 Laporan	3.306.250	1 Laporan	3.802.187	1 Laporan	4.372.519	4 Laporan	14.355.952.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1.000.500	1 Laporan	1.150.575	17 Laporan	1.323.161	17 Laporan	1.521.638	17 Laporan	1.749.880	4 Laporan	5.745.251.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.300.000	1 Dokumen	2.645.000	1 Dokumen	3.041.750	1 Dokumen	3.498.012	4Dokumen	11.484.762.000	Baik Bukti	
		2.18.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH			0 Dokumen			1 Dokumen	6.952.800	1 Dokumen	7.452.800	1 Dokumen	7.952.800	1 Dokumen	8.952.800	4 Dokumen	31.311.200.000	Baik Bukti
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	6.952.800	1 Dokumen	7.452.800	1 Dokumen	7.952.800	1 Dokumen	8.952.800	4 Dokumen	31.311.200.000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	-		1 Dokumen	22.200.000	1 Dokumen	25.700.000	1 Dokumen	23.500.000	1 Dokumen	24.000.000	4 Dokumen	95.400.000.000	Luar Lampung Barat			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang		4 Orang		4 Orang		4 Orang		16 orang					
2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0		1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	20.700.000.000				
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	-		4 Orang	18.000.000	4 Orang	20.700.000	4 Orang	18.000.000	4 Orang	18.000.000	16 Orang	74.700.000.000	Luar Lampung Barat			
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		1 Paket	151.704.000	1 Paket	184.447.275	1 Paket	220.644.212	1 Paket	264.015.658	4 Paket	820.811.145.000	Baik Bukti			

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket			3 Paket			3 Paket			3 Paket			12 Paket		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket			3 Paket			3 Paket			3 Paket			12 Paket		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket			8 Paket			8 Paket			8 Paket			8 Paket		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen			5 Dokumen			5 Dokumen			5 Dokumen			5 Dokumen		
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan			12 Laporan			12 Laporan			12 Laporan			48 Laporan		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan			12 Laporan			12 Laporan			12 Laporan			48 Laporan		
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	2.034.000	1 Paket	2.339.100	1 Paket	2.689.965	1 Paket	3.093.459	1 Paket	3.557.477	4 Paket	11.680.001.000			4 Paket		Baik Bukti
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	3 Paket	1.300.000	3 Paket	1.495.000	3 Paket	1.719.250	3 Paket	1.977.137	12 Paket	6.491.387.000			12 Paket		Baik Bukti
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	3 Paket	1.500.000	3 Paket	1.725.000	3 Paket	1.983.750	3 Paket	2.281.312	12 Paket	7.490.062.000			12 Paket		Baik Bukti
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis	8 Jenis	20.205.000	8 Paket	30.307.500	8 Paket	39.399.750	8 Paket	47.279.700	8 Paket	56.735.640	8 Paket	173.722.590.000			8 Paket		Baik Bukti
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 SKHU	5 SKHU	4.860.000	5 Dokumen	5.589.000	5 Dokumen	6.427.350	5 Dokumen	7.391.452	5 Dokumen	8.500.169	5 Dokumen	27.907.971.000			5 Dokumen		Baik Bukti
2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Kali	12 Kali	5.076.000	12 Laporan	5.837.400	12 Laporan	6.713.010	12 Laporan	7.719.961	12 Laporan	8.877.955	48 Laporan	29.148.326.000			48 Laporan		Baik Bukti
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Kali	12 Kali	68.554.000	12 Laporan	102.831.000	12 Laporan	123.397.200	12 Laporan	148.076.640	12 Laporan	177.691.968	48 Laporan	551.996.808.000			48 Laporan		Lampung Barat dan Luar Lampung Barat
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	1.300.000	12 Dokumen	1.690.000	12 Dokumen	2.197.000	48 Dokumen	6.187.000.000			48 Dokumen		
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	1.690.000	2 Dokumen	2.197.000	2 Dokumen	6.187.000.000			2 Dokumen		
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	446.400.000	0	69.700.000	0	977.000.000	0	245.500.000	1 Unit	1.738.600.000.000			1 Unit		Baik Bukti
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit			11 Unit			27 Unit		10 Unit				57 Unit		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit			9 Unit			4 Unit		20 Unit				36 Unit		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit			2 Unit			3 Unit		3 Unit				3 Unit		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit			1 Unit			1 Unit		1 Unit				4 Unit		
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	355.000.000							1 Unit	355.000.000.000			1 Unit		Baik Bukti
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		0	9 Unit	13.700.000	11 Unit	16.600.000	27 Set	319.000.000	10 Set	159.500.000	57 Unit	508.800.000.000			57 Unit		Baik Bukti
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		10.000.000	8 Unit	57.700.000	9 Unit	23.100.000	4 Unit	428.000.000	25 Unit	56.000.000	36 Unit	564.800.000.000			36 Unit		Baik Bukti
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	1 Unit	10.000.000	2 Unit	20.000.000	3 Unit	220.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	270.000.000.000			3 Unit		Baik Bukti
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit		1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	4 Unit	40.000.000.000			4 Unit		Baik Bukti
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi		12 Laporan	203.573.100	12 Laporan	234.109.064	4 Laporan	1.731.245.423	12 Laporan	1.990.932.235	48 Laporan	4.159.859.822.000			48 Laporan		Baik Bukti
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				48 Laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan				48 Laporan		
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.210 Surat Masuk & Keluar	6.761 Surat Masuk & Keluar	1.385.000	12 Laporan	1.592.750	12 Laporan	1.831.662	12 Laporan	2.106.411	12 Laporan	2.422.372	48 Laporan	7.953.195.000			48 Laporan		Baik Bukti
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rekening	4 Rekening	22.340.000	12 Laporan	29.042.000	12 Laporan	33.398.300	12 Laporan	1.500.428.045	12 Laporan	1.725.492.251	48 Laporan	3.288.360.596.000			48 Laporan		Baik Bukti
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Sub Organisasi	4 Sub Organisasi	133.029.500	12 Laporan	172.938.350	12 Laporan	198.679.102	12 Laporan	228.710.967	12 Laporan	263.017.612	48 Laporan	863.546.031.000			48 Laporan		Baik Bukti
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Laporan		11 Unit	230.054.100	11 Unit	264.562.215	11 Unit	307.989.047	11 Unit	354.187.404	11 Unit	1.156.792.766.000			11 Unit		Baik Bukti
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0.000			Unit		Baik Bukti

		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit						
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Kendaraan	11 Kendaraan	120.340.000	11 Unit	144.408.000	11 Unit	166.069.200	11 Unit	190.979.580	11 Unit	219.626.517	11 Unit	721.083.297.000		Baik Bukti			
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	0,000		Baik Bukti			
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	10.497.000	9 Unit	13.646.100	9 Unit	15.893.015	9 Unit	18.046.967	9 Unit	20.754.012	9 Unit	68.140.094.000		Baik Bukti			
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	2 Gedung	1.531.000	2 Unit	65.000.000	2 Unit	74.750.000	2 Unit	85.962.500	2 Unit	98.856.875	2 Unit	324.569.375.000		Baik Bukti			
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.300.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	3.450.000	2 Unit	10.750.000.000		Baik Bukti			
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.750.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	11.500.000	1 Unit	32.250.000.000		Baik Bukti			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan	85%	85%		100%	584.605.000	100%	533.066.400	100%	529.019.950	100%	637.259.240	100%	2.283.950.590.000		Kabupaten lampung Barat			
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	1.708 Izin	508 Izin		400 Pelaku Usaha	584.605.000	2000 Pelaku Usaha	533.066.400	2200 Pelaku Usaha	529.019.950	2420 Pelaku Usaha	637.259.240	7020 Pelaku Usaha	2.283.950.590.000		Kabupaten lampung Barat			
		Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik				60 Kegiatan Usaha		65 Kegiatan Usaha		70 Kegiatan Usaha		75 Kegiatan Usaha		270 Kegiatan Usaha						
		Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha				20 Orang		16 Orang		10 Orang		5 Orang		51 Orang						
		Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				0		1 Kegiatan Usaha		3 Kegiatan Usaha		5 Kegiatan Usaha		9 Kegiatan Usaha						
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.721 Orang	521 Orang		400 Pelaku Usaha	485.090.000	-	0	-	0	-	0	7020 Pelaku Usaha	485.090.000.000		Baik Bukti			
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	189 Survey Perizinan	89 Survey Perizinan		60 Kegiatan Usaha	73.565.000	0	0	0	0	0	0	60 Kegiatan Usaha	73.565.000.000		Kabupaten lampung Barat			
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 laporan	4 Laporan		20 Orang	25.950.000	-	0	-	0	-	0	20 Orang	25.950.000.000		Kabupaten lampung Barat			
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	-	-				1 Kegiatan Usaha	25.000.000	3 Kegiatan Usaha	45.120.900	5 Kegiatan Usaha	75.000.000	9 Kegiatan Usaha	145.120.900.000		Kabupaten lampung Barat			
2.18.04.2.01.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui sistem perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	0	0		0	0	2000 Pelaku Usaha	398.599.900	2200 Pelaku Usaha	363.485.900	2420 Pelaku Usaha	429.804.790	6620 Pelaku Usaha	1.191.890.590.000					
2.18.04.2.01.07	Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	0	0		0	0	150 Pelaku Usaha	28.545.000	175 Pelaku Usaha	31.399.500	200 Pelaku Usaha	34.539.450	525 Pelaku Usaha	94.483.950.000					
2.18.04.2.01.08	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	0	0		0	0	65 Kegiatan Usaha	80.921.500	70 Kegiatan Usaha	89.013.650	75 Kegiatan Usaha	97.915.000	210 Kegiatan Usaha	267.850.150.000					
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	20%	300.000.000		20%	65.000.000	20%	435.000.000	20%	150.000.000	80%	950.000.000.000	DPMP/TSP	Liwa	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Kepala daerah/ Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0		1 Dokumen	300.000.000		0	65.000.000	1 Dokumen	435.000.000	0	150.000.000	2 Dokumen	950.000.000.000	DPMP/TSP	Liwa

		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				0		1 Kegiatan Usaha		3 Kegiatan Usaha		5 Kegiatan Usaha		9 Kegiatan Usaha			
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala daerah/ Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0		1 Dokumen	300.000.000	0	0	1 Dokumen	330.000.000	0	0	2 Dokumen	630.000.000.000	DPMP/TSP	Liwa
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	0				1 Kegiatan usaha	65.000.000	3 Kegiatan usaha	105.000.000	5 Kegiatan Usaha	150.000.000	9 Kegiatan Usaha	320.000.000.000	DPMP/TSP	Liwa
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investasi	0	0		10%	1.800.000.000	15%	2.080.000.000	20%	2.178.000.000	20%	2.505.800.000	80%	8.563.800.000.000	DPMP/TSP	Liwa
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	0		0	1.800.000.000	1 Dokumen	2.080.000.000	0	2.178.000.000	1 Dok	2.505.800.000	2 Dokumen	8.563.800.000.000	DPMP/TSP	Liwa
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen			
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	0				1 Dokumen	100.000.000			1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	210.000.000.000	DPMP/TSP	Liwa
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1.800.000.000	3 Dokumen	1.980.000.000	3 Dokumen	2.178.000.000	3 Dokumen	2.395.800.000	10 Dokumen	8.353.800.000.000	DPMP/TSP	Lampung Barat dan Luar Lampung Barat
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	75%	75%	326.122.000	75%	345.997.000	85%	380.596.700	90%	418.656.370	100%	460.522.007	100%	1.605.772.077.000	DPMP/TSP	Lampung Barat
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	3 kegiatan	3 Laporan	326.122.000	8 Kegiatan Usaha	345.997.000	9 Kegiatan Usaha	380.596.700	10 Kegiatan Usaha	418.656.370	10 Kegiatan Usaha	460.522.007	37 Kegiatan Usaha	1.605.772.077.000	DPMP/TSP	Lampung Barat
		Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan dan pengawasan perizinan berbasis resiko				210 Pelaku Usaha		210 Pelaku Usaha		210 Pelaku Usaha		210 Pelaku Usaha		840 Pelaku Usaha		DPMP/TSP	
		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha				13 Kegiatan Usaha		14 Kegiatan Usaha		15 Kegiatan Usaha		15 Kegiatan Usaha		57 Kegiatan Usaha		DPMP/TSP	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14 Unit Usaha	8 Unit Usaha	48.300.000	8 Kegiatan Usaha	48.300.000	9 Kegiatan Usaha	53.130.000	10 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	0	37 Kegiatan Usaha	101.430.000.000	DPMP/TSP	Lampung Barat
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	520 Orang	260 Orang		210 Pelaku Usaha	216.822.000	0	0	0	0	0	0	210 Pelaku Usaha	216.822.000.000	DPMP/TSP	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	26 Unit Usaha	26 Unit usaha		13 Kegiatan Usaha	80.875.000	0	0	0	0	0	0	13 Kegiatan Usaha	80.875.000.000	DPMP/TSP	
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya				0	0	0	0	10 Kegiatan Usaha	58.443.000	10 Kegiatan Usaha	64.287.300	20 Kegiatan Usaha	122.730.300.000	DPMP/TSP	
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis /sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan dan pengawasan perizinan berbasis resiko	520 Orang	260 Orang	181.222.000	0	0	210 Pelaku Usaha	238.504.200	210 Pelaku Usaha	262.354.620	210 Pelaku Usaha	288.590.062	630 Pelaku Usaha	789.448.902.000	DPMP/TSP	Lampung Barat
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	26 Unit Usaha	26 Unit Usaha	96.600.000	0	0	14 Kegiatan Usaha	88.962.500	15 Kegiatan Usaha	97.858.750	15 Kegiatan Usaha	107.644.625	44 Kegiatan Usaha	294.465.875.000	DPMP/TSP	Lampung Barat
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui media publikasi website DPMP/TSP	15 Sektor Usaha	15 Sektor Usaha	34.000.000	100%	72.000.000	100%	74.000.000	100%	76.100.000	100%	78.305.000	100%	300.405.000.000	DPMP/TSP	Balik Bukit
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	76.100.000	1 Dokumen	78.305.000	4 Dokumen	300.405.000.000	DPMP/TSP	Balik Bukit
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Buku	1 Buku	34.000.000	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	76.100.000	1 Dokumen	78.305.000	4 Dokumen	300.405.000.000	DPMP/TSP	Balik Bukit
							7.078.732.530		7.273.729.907		10.765.161.900		11.160.669.760		0.000		
															36.279.194.101.000		
															0.000		

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	DETAIL KHUSUS SUB KEGIATAN TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renstra,Cascading,IKU, Renja, Renja Perubahan, PK,PK Perubahan,KAK,Rencana Aksi, PPAS,PPAS Perubahan,)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renstra,Cascading,IKU, Renja, Renja Perubahan, PK,PK Perubahan,KAK,Rencana Aksi, PPAS,PPAS Perubahan.)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renstra,Cascading,IKU, Renja, Renja Perubahan, PK,PK Perubahan,KAK,Rencana Aksi, PPAS,PPAS Perubahan.)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renstra,Cascading,IKU, Renja, Renja Perubahan, PK,PK Perubahan,KAK,Rencana Aksi, PPAS,PPAS Perubahan.)
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA sebanyak 1 Dokumen
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan sebanyak 1 Dokumen
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA sebanyak 1 Dokumen
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen	Penyusunan laporan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen	Penyusunan laporan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen	Penyusunan laporan capaian kinerja sebanyak 4 dokumen
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Tr. I,II,III,IV, Evaluasi Rencana Aksi Tr. I,II,III,IV, LKIP,Laporan akhir Tahun)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Tr. I,II,III,IV, Evaluasi Rencana Aksi Tr. I,II,III,IV, LKIP,Laporan akhir Tahun)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Tr. I,II,III,IV, Evaluasi Rencana Aksi Tr. I,II,III,IV, LKIP,Laporan akhir Tahun)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (LKPJ, LPPD, Evaluasi Renja Tr. I,II,III,IV, Evaluasi Rencana Aksi Tr. I,II,III,IV, LKIP,Laporan akhir Tahun)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan pembayaran gaji dan pegawai sebanyak 27 Orang	Pelaksanaan pembayaran gaji dan pegawai sebanyak 27 Orang	Pelaksanaan pembayaran gaji dan pegawai sebanyak 27 Orang	Pelaksanaan pembayaran gaji dan pegawai sebanyak 27 Orang
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan 12 Laporan, Triwulanan : 4 Laporan semesteran sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan keuangan bulanan 12 Laporan, Triwulanan : 4 Laporan semesteran sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan keuangan bulanan 12 Laporan, Triwulanan : 4 Laporan semesteran sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan keuangan bulanan 12 Laporan, Triwulanan : 4 Laporan semesteran sebanyak 1 laporan
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan laporan prognosis sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan prognosis sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan prognosis sebanyak 1 laporan	Penyusunan laporan prognosis sebanyak 1 laporan
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan laporan RKBMD sebanyak 1 Laporan	Penyusunan laporan RKBMD sebanyak 1 Laporan	Penyusunan laporan RKBMD sebanyak 1 Laporan	Penyusunan laporan RKBMD sebanyak 1 Laporan
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2.18.01.2.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 dokumen
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi sebanyak 4 orang	Pelaksanaan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi sebanyak 4 orang	Pelaksanaan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi sebanyak 4 orang	Pelaksanaan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi sebanyak 4 orang
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan paket komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket	Penyediaan paket komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket	Penyediaan paket komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket	Penyediaan paket komponen instalasi listrik sebanyak 1 paket
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan kantor sebanyak 3 paket	Penyediaan peralatan kantor sebanyak 3 paket	Penyediaan peralatan kantor sebanyak 3 paket	Penyediaan peralatan kantor sebanyak 3 paket
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket	Penyediaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket	Penyediaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket	Penyediaan barang cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan /SKHU sebanyak 5 SKHU	Penyediaan bahan bacaan /SKHU sebanyak 5 SKHU	Penyediaan bahan bacaan /SKHU sebanyak 5 SKHU	Penyediaan bahan bacaan /SKHU sebanyak 5 SKHU
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum tamu selama 12 bulan	Penyediaan makan minum tamu selama 12 bulan	Penyediaan makan minum tamu selama 12 bulan	Penyediaan makan minum tamu selama 12 bulan
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 12 Laporan
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 1 Unit			
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja kerja, kursi sebanyak 9 unit	Pengadaan meja kerja, kursi, lemari arsip (sebanyak 13 unit)	Pengadaan meja kerja, kursi kerja serta mebelair mall pelayanan publik sebanyak 27 set	Pengadaan meja kerja, kursi kerja serta mebelair mall pelayanan publik sebanyak 10 set
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan laptop dan printer	Pengadaan laptop,pc dan printer, alat permainan, box bayi	Pengadaan laptop,pc dan printer	Pengadaan laptop,pc dan printer
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan cctv, mesin antry	Pengadaan Genset	Pengadaan sarana prasarana MPP dan kantor	Pengadaan sarana prasarana MPP dan kantor
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana pendukung kantor	Pengadaan sarana pendukung kantor	Pengadaan sarana pendukung kantor	Pengadaan sarana pendukung kantor
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Surat Masuk dan Surat Keluar	Penyediaan Surat Masuk dan Surat Keluar	Penyediaan Surat Masuk dan Surat Keluar	Penyediaan Surat Masuk dan Surat Keluar
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa listrik, telfon, air dan internet kantor	Pembayaran jasa listrik, telfon, air dan internet kantor	Pembayaran jasa listrik, telfon, air dan internet kantor dan MPP	Pembayaran jasa listrik, telfon, air dan internet kantor dan MPP
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium,pengadaan alat tulis kantor, pengadaan bahan kegiatan kantor lainnya	Pembayaran honorarium,pengadaan alat tulis kantor, pengadaan bahan kegiatan kantor lainnya	Pembayaran honorarium,pengadaan alat tulis kantor, pengadaan bahan kegiatan kantor lainnya	Pembayaran honorarium,pengadaan alat tulis kantor, pengadaan bahan kegiatan kantor lainnya
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 2 unit mobil dan 9 unit motor	Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 2 unit mobil dan 9 unit motor	Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 2 unit mobil dan 9 unit motor	Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 2 unit mobil dan 9 unit motor
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Laptop, Komputer dan Genset	Pemeliharaan Laptop, Komputer dan Genset	Pemeliharaan Laptop, Komputer dan Genset	Pemeliharaan Laptop, Komputer dan Genset
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan atap dan plafon kantor	Pemeliharaan Gedung kantor sebanyak 2 unit	Pemeliharaan Gedung kantor sebanyak 2 unit	Pemeliharaan Gedung kantor sebanyak 2 unit
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana gedung kantor	Pemeliharaan sarana gedung kantor	Pemeliharaan sarana gedung kantor	Pemeliharaan sarana gedung kantor
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehab plang kantor	Pemeliharaan rehab nomenklatur dinas	Pemeliharaan prasarana pendukung gedung kantor	Pemeliharaan prasarana pendukung gedung kantor
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				

2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada pelaku usaha sebanyak 400 Pelaku Usaha serta persiapan pelaksanaan MPP	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada pelaku usaha sebanyak 2000 Pelaku Usaha serta pelaksanaan persiapan MPP, dan FKP	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada pelaku usaha sebanyak 2200 Pelaku Usaha serta pelaksanaan persiapan MPP	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada pelaku usaha sebanyak 2420 Pelaku Usaha
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pelaksanaan survey perizinan terhadap pelaku usaha sebanyak 60 Kegiatan usaha di Kecamatan se Kabupaten Lampung Barat	Pelaksanaan survey perizinan, pemantauan, serta pelaporan terkait perizinan terhadap pelaku usaha sebanyak 65 Kegiatan usaha se Kabupaten Lampung Barat	Pelaksanaan survey perizinan pemantauan, serta pelaporan terkait perizinan terhadap pelaku usaha sebanyak 70 Kegiatan usaha se Kabupaten Lampung Barat	Pelaksanaan survey perizinan pemantauan, serta pelaporan terkait perizinan terhadap pelaku usaha sebanyak 75 Kegiatan usaha se Kabupaten Lampung Barat
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaksanaan Pelayanan konsultasi /pengaduan baik secara online maupun langsung	Pelaksanaan Pelayanan konsultasi /pengaduan baik secara online maupun langsung	Pelaksanaan Pelayanan konsultasi /pengaduan baik secara online maupun langsung	Pelaksanaan Pelayanan konsultasi /pengaduan baik secara online maupun langsung
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan Peraturan Bupati dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebanyak 1 Perbub	0	Penyusunan Peraturan Bupati dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebanyak 1 Perbub	0
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah sebanyak 1 Kegiatan usaha	Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah sebanyak 3 Kegiatan usaha	Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah sebanyak 5 Kegiatan usaha
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	0	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten sebanyak 1 Perbub	0	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten sebanyak 1 Perbub

2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi sebanyak 2 Kali yaitu di Lampung Barat dan di Luar Lampung Barat	Pelaksanaan Promosi sebanyak 3 Kali yaitu promosi investasi dalam provinsi, promosi investasi dalam daerah dan expo	Pelaksanaan Promosi sebanyak 3 Kali yaitu promosi investasi dalam provinsi, promosi investasi dalam daerah dan expo	Pelaksanaan Promosi sebanyak 3 Kali yaitu promosi investasi dalam provinsi, promosi investasi dalam daerah dan expo
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 8 Kegiatan usaha yaitu	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 9 Kegiatan usaha yaitu	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 10 Kegiatan usaha yaitu	Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 10 Kegiatan usaha yaitu
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 210 Pelaku usaha			
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan sebanyak 13 Kegiatan Usaha			
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya			Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sebanyak 10 kegiatan usaha	Pelaksanaan penyelesaian permasalahan sebanyak 10 kegiatan usaha
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha		Pelaksanaan Bimbingan teknis Penanaman odal terhadap 210 Pelaku Usaha serta penyelesaian permasalahan dan hambatan terhadap 6 kegiatan usaha	Pelaksanaan Bimbingan teknis Penanaman modal terhadap 210 Pelaku Usaha serta penyelesaian permasalahan dan hambatan terhadap 10 kegiatan usaha	Pelaksanaan Bimbingan teknis Penanaman odal terhadap 210 Pelaku Usaha serta penyelesaian permasalahan dan hambatan terhadap 10 kegiatan usaha
	Pengawasan Penanaman Modal		Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal serta evaluasi terhadap 14 Kegiatan Usaha	Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal serta evaluasi terhadap 15 Kegiatan Usaha	Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal serta evaluasi terhadap 15 Kegiatan Usaha
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 1 dokumen
-----------------	--	--	--	--	--